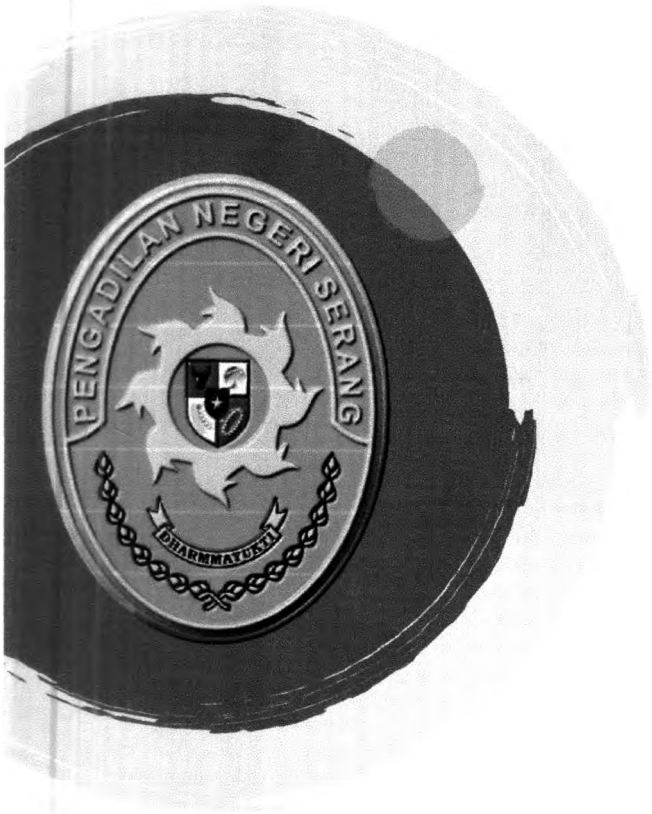


LAPORAN HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022



Jl. Raya Pandeglang Km.
6 Serang-Banten



(0254) 200644-200940



PNSerang12@gmail.com



PENGADILAN SERANG

**LEMBAR PENGESAHAN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA**

*Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung - Maju
Badilum - Sukses
Zona Integritas - Bermutu
PN Serang - Luar Biasa
PN Serang - Luar Biasa
PN Serang - Luar Biasa*

**Disahkan Di : Serang
Tanggal : 1 April 2022**

Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA



TOTOK SAPTO INDRATO, SH., MH
NIP. 19640516 199212 1 001

Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO, SH
NIP. 19710723 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini di susun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2022 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 1 April 2022
Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO, S.H.
NIP.19710723 199603 1 00 1

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
1.4.1 Persiapan	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel.....	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden.....	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya	11

3.2.5	Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6	Indeks pada indikator hadiah	12
3.2.7	Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13
3.2.8	Indeks pada indikator percaloan.....	13
3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
Rekomendasi.....	1
7	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survey IPK Menuju ZI	7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	
7	
Tabel 3. Nilai Persepsi	8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden	10
Tabel 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	11
Tabel 8. Indeks Menjual Pengaruh	11
Tabel 9. Indeks pada Transaksi Biaya	12
Tabel 10. Indeks pada Biaya Tambahan.....	12
Tabel 11. Indeks pada Hadiah	13
Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13
Tabel 13. Tabel indeks pada Percaloan	14

Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang.....	14
Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi rahasia.....	15
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	16
Tabel 18. Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

LAMPIRAN

A. Kuesioner

B. Hasil Perhitungan IPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan satuan kerja yang mempunyai peran dan penyelenggara fungsi layanan yang strategis kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi suap dan pungli dalam memberikan pelayanannya. Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A dapat mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran penyusunan laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang.

Survey disusun berdasar rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner;
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
- c. Kelengkapan peralatan.
- d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
- e. Penyusunan Jadwal
- f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- A. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- B. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- C. Pengujian kualitas dan validitas data.
- D. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Rencana Kerja Tim Survey indeks Persepsi Korupsi Pengadilan

Negeri Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	30 - 31 Desember 2021

2	Pelaksanaan Survey/ Pengumpulan Data	3 Januari - 31 Maret 2022	
3	Pengolahan Data	1 April 2022	
4	Penyusunan dan Pelaporan	1 April 2022	
5	Pengesahan	1 April 2022	

Metode Survey

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat,

dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

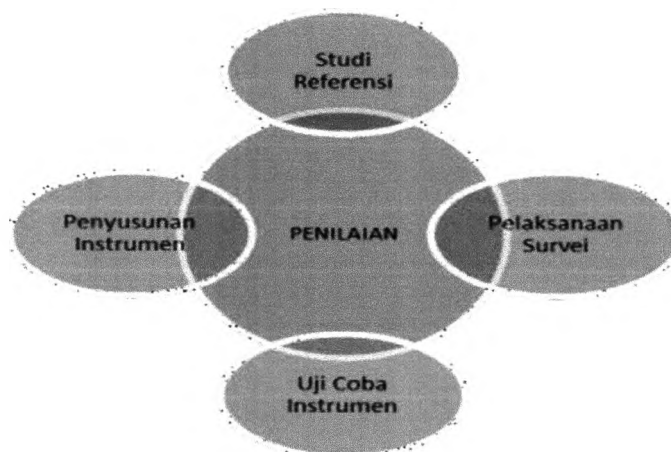
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

Ruang lingkup
Manipulasi Peraturan
Penyalahgunaan Jabatan
Menjual Pengaruh
Transparansi Biaya
Transaksi Rahasia
Biaya Tambahan
Hadiah
Transparansi Pembayaran
Percaloan
Perbuatan Curang

Tabel 3 Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

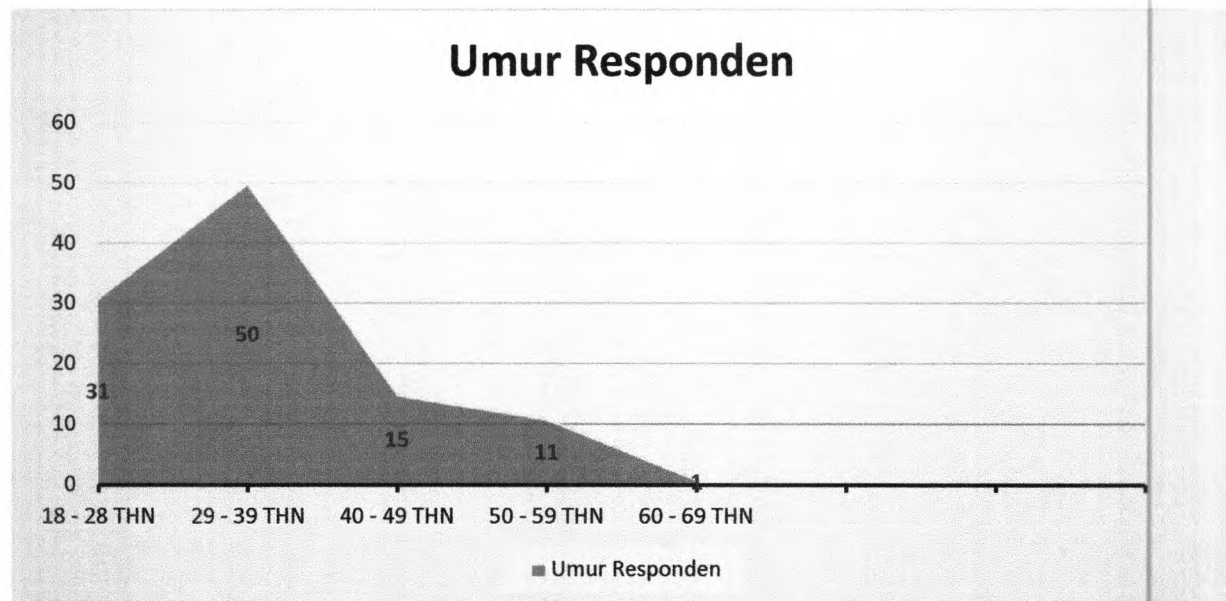
BAB III
INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Tabel Data Umur Responden

Tabel 4

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	31	28,70 %
2	29 - 39 Thn	50	46,30 %
3	40 - 49 Thn	15	13,89 %
4	50 - 59 Thn	11	10,19 %
5	60 - 69 Thn	1	0,93 %
6	Total	108	

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden

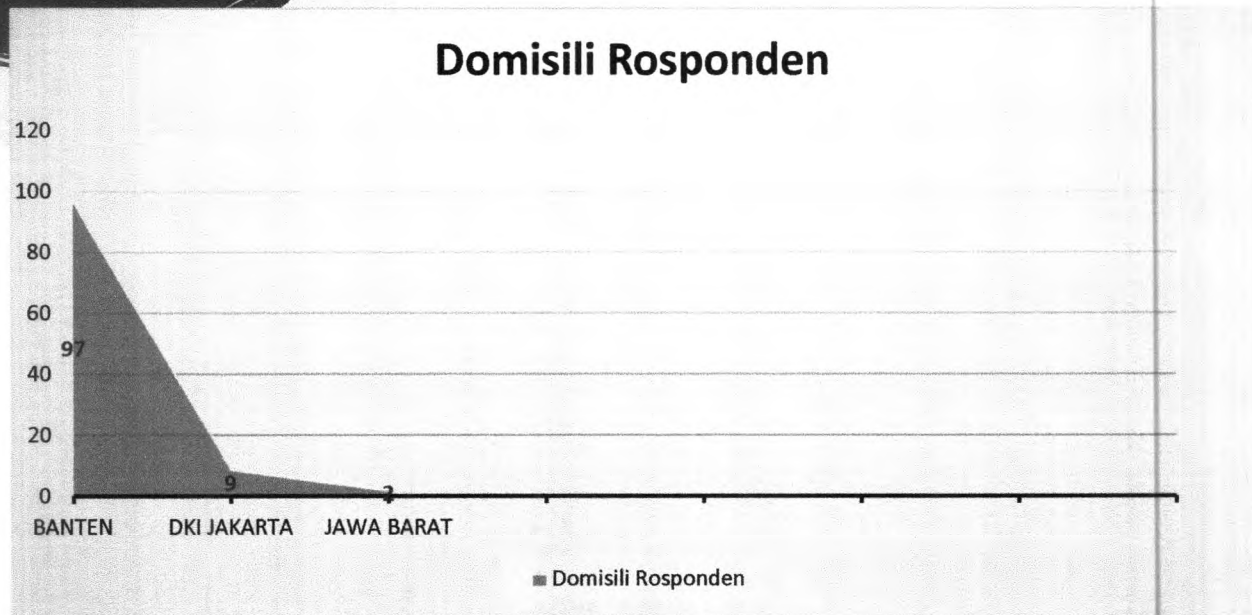


● **Tabel Data Domisili Responden**

Tabel 5

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	97
2	DKI Jakarta	9
3	Jawa Barat	

Grafik 2. Profil Data Domisili Responden



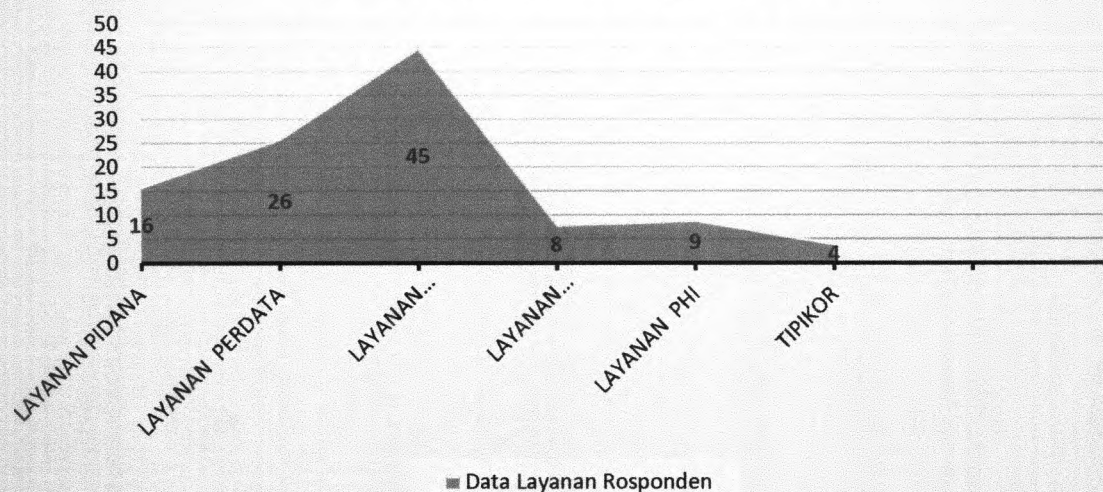
● **Tabel Data Layanan**

Tabel 6

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	16
2	Layanan Perdata	26
3	Layanan Hukum/Informasi	45
4	Layanan Administrasi Umum	8
5	Layanan PHI	9
6	Layanan Tipikor	4

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden

Data Layanan Rosponden



● Tabel Nilai Per Unsur

Tabel 7

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH	415	424	390	360	363	386	375	423	411	425
NILAI RATA - RATA	3,843	3,926	3,611	3,333	3,361	3,574	3,472	3,917	3,806	3,935
NRR TERTIMBANG	0,384	0,393	0,361	0,333	0,336	0,357	0,347	0,392	0,381	0,394

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat

Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

Tabel 8

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu:

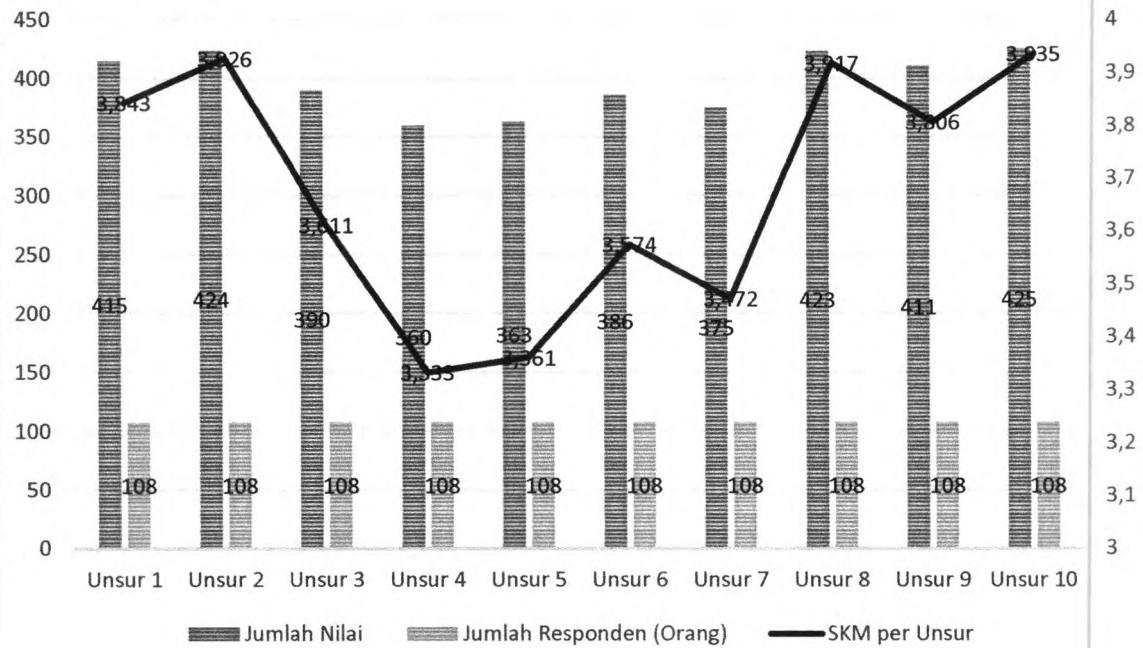
Tabel 9

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
2.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
3.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Artinya dari 108 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grafik 1. Nilai Survey Persepsi korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,68 atau 91,94%.

Indeks 3,68 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 91,94%.

Tabel 10

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi

2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir

BAB IV PENUTUP

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,68 berada pada angka 91,94% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,843;
2. Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,926;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,611;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,333;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,361;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,574;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,472;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,917;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,806;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,935.

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu:

1. Unsur 10 mendapatkan Nilai 425

(Unsur mengenai Indikator transaksi rahasia)

2. Unsur 2 mendapatkan Nilai 424)

(Unsur mengenai Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan)

3. Unsur 8 mendapatkan Nilai 423

(Unsur mengenai Indikator Percalonan)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 4 mendapatkan Nilai 360

(Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya)

2. Unsur 5 mendapatkan Nilai 363

(Unsur mengenai Indikator Biaya Tambahan)

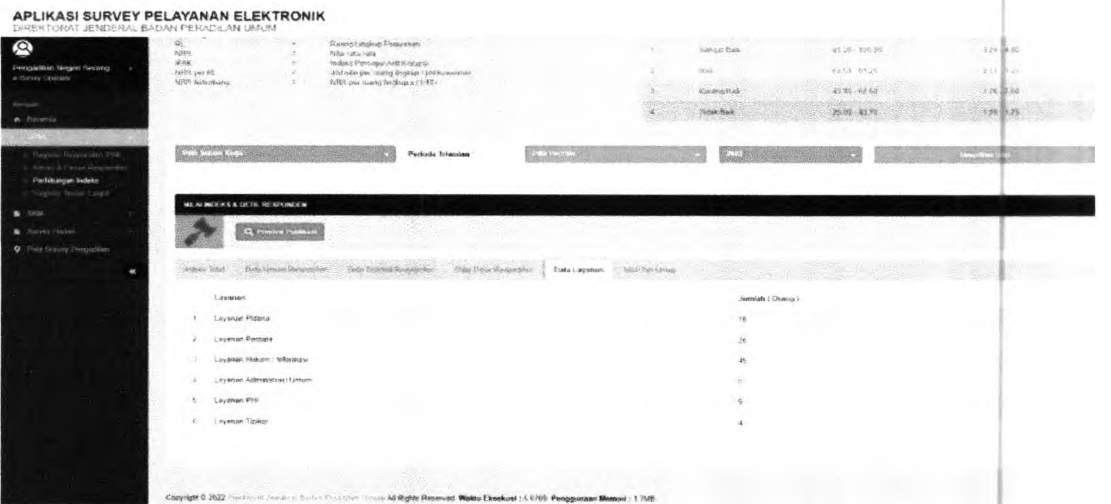
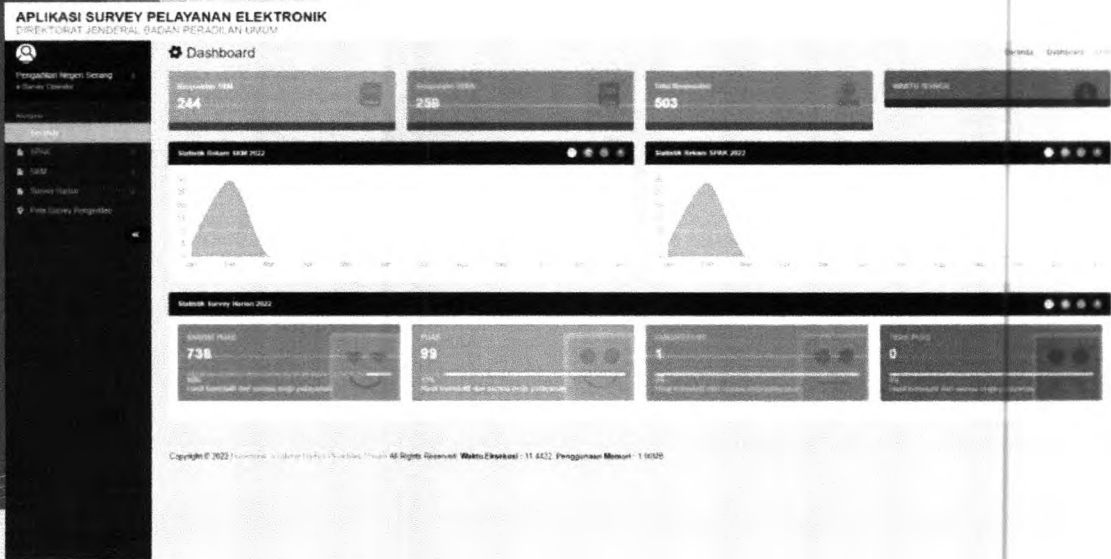
3. Unsur 7 mendapatkan Nilai 375

(Unsur mengenai Indikator Transparansi Biaya)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,935 dari indikator transaksi rahasia mendapat pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Informasi Transaksi Biaya mendapat memiliki indeks paling rendah yakni dengan indeks 3,333 diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.

Lampiran :



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Proyeksi Negatif Serang
Nanny Usman

Mision

Dashboard

Dashboard

Regulasi Peradilan PHK
Rencana & Pelan Responden

Pelaksanaan Indeks
Regulasi Tidak Lulus

SIKI

Survey Harian

Paik Survey Pengadilan

REAL INDEX & DETIL RESPONDER



Indeks Detil	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Nilai Per User	Keterangan
Deskripsi	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
Jumlah	475	424	390	360	363	386	375	423	411	425			
NRR Per RL	3.843	3.526	3.511	3.133	3.307	3.574	3.472	3.917	3.806	3.935		34.772	
NRR Tertimbang	0.354	0.363	0.361	0.333	0.336	0.357	0.347	0.392	0.381	0.394		3.618	
SIKI (0-100)												3.618	

EMULASI REAL INDEX

1 User Terendah 1 User Tertinggi

No. User

- 1 Apakah pernah mengatasi perkara melalui media - Panitia / Staff Pengadilan atau pengadilan ?
- 2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara legal dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk memaksa inkuiri terburu ?
- 3 Apakah pernah mengetahui ada praktik penyalahgunaan dalam penggunaan layanan di Pengadilan ?

Nilai
425
424
423

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Proyeksi Negatif Serang
Nanny Usman

Mision

Dashboard

Dashboard

Regulasi Peradilan PHK
Rencana & Pelan Responden

Pelaksanaan Indeks
Regulasi Tidak Lulus

SIKI

Survey Harian

Paik Survey Pengadilan

REAL INDEX & DETIL RESPONDER



Indeks Detil	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Detil Utama Responden	Nilai Per User	Keterangan
Deskripsi	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
Jumlah	475	424	390	360	363	386	375	423	411	425			
NRR Per RL	3.843	3.526	3.511	3.133	3.307	3.574	3.472	3.917	3.806	3.935		34.772	
NRR Tertimbang	0.354	0.363	0.361	0.333	0.336	0.357	0.347	0.392	0.381	0.394		3.618	
SIKI (0-100)												3.618	

EMULASI REAL INDEX

1 User Terendah 1 User Tertinggi

No. User

- 1 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang lembaga baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
- 2 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ?
- 3 Apakah menerima baik kamukho keuangan / pembayaran yang baik sesuai proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

Nilai
360
363
375

FORM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Nama : (nama boleh kosong sebagai anonim)
Usia :
Nomor HP :
Pekerjaan :
Domisili :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 - a. Tidak sesuai prosedur
 - b. Jarang sesuai prosedur
 - c. Sering sesuai prosedur
 - d. Selalu sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
 - a. Petugas melayani selalu meminta imbalan
 - b. Petugas melayani sering meminta imbalan
 - c. Petugas melayani jarang meminta imbalan
 - d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
 - a. Tidak pernah
 - b. Jarang
 - c. Sering
 - d. Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 - a. Tidak pernah
 - b. Jarang
 - c. Sering
 - d. Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
 - a. Tidak pernah
 - b. Jarang
 - c. Sering
 - d. Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak ada

LAYANAN ELEKTRONIK

IN PERADILAN UMUM

RL	=	Ruang Lingkup Pelayanan	1	Sangat Baik	81,26 - 100,00
NRR	=	Nilai rata-rata			
IPAK	=	Indeks Parsepsi Anti Korupsi	2	Baik	62,51 - 81,25
NRR per RL	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner			
NRR tertimbang	=	NRR per ruang lingkup x (1/10)	3	Kurang Baik	43,76 - 62,50
			4	Tidak Baik	25,00 - 43,75

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per User
	Deskripsi		Jumlah (Orang)		% (Persen)
	18 - 28 Th		31		28,70
	29 - 39 Th		50		46,30
	40 - 49 Th		15		13,89
	50 - 59 Th		11		10,19
	60 - 69 Th		1		0,93
	Total		108		

LAYANAN ELEKTRONIK DARI PENGADILAN UMUM

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Donasi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur					
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Jumlah	415	424	390	360	363	386	375	423	411	425
NRR Per RL	3.843	3.926	3.611	3.333	3.361	3.674	3.472	3.917	3.806	3.935
NRR Tertimbang	0.384	0.393	0.361	0.333	0.336	0.357	0.347	0.392	0.381	0.394
IPAK Unit Pelayanan										

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No. Unsur

- 1 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
- 2 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
- 3 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

LAYANAN ELEKTRONIK AN PERADILAN UMUM

RL	=	Ruang Lingkup Pelayanan	1	Sangat Baik	81.25 - 100.00
NRR	=	Nilai rata-rata	2	Baik	62.51 - 81.25
IPAK	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3	Kurang Baik	43.76 - 62.50
NRR per RL	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner	4	Tidak Baik	25.00 - 43.75
NRR tertimbang	=	NRR per ruang lingkup x (1/10)			

Pilih Satuan Kerja ▼ Periode Triwulan * ▼ Pilih Periode ▼ 2022 ▼ Ta

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domestik Responden | Data Umuk Responden | **Data Layanan** | Nilai Per Unsir

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana	16
2 Layanan Perdata	26
3 Layanan Hukum / Informasi	45
4 Layanan Administrasi Umum	8
5 Layanan PHI	9
6 Layanan Tipikor	4

LAYANAN ELEKTRONIK

DI BAWAH PERADILAN UMUM

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Perhitungan Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi					
Reglster ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.					
Keterangan		Bobot IPAK			
RL	=	Ruang Lingkup Pelayanan	1	Sangat Baik	81.25 - 100.00
NRR	=	Nilai rata-rata	2	Baik	62.51 - 81.25
IPAK	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3	Kurang Baik	43.75 - 62.50
NRR per RL	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner	4	Tidak Baik	25.00 - 43.75
NRR tertimbang	=	NRR per ruang lingkup x (1/10)			

Pilih Satuan Kerja Periode Triwulan * Pilih Periode 2022

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur	Unsur	Unsur	Unsur	Unsur
		Daerah Domisili				Jumlah (Orang)			
		1 DKI JAKARTA				9			
		2 JAWA BARAT				2			
		3 BANTEN				97			